

ANALISIS KEBUTUHAN KAYU PERTUKANGAN DAN POTENSI PASAR KAYU JATI CURIAN

Oleh : Sugeng Djarot Sulasmanto
Program Studi : Ilmu Kehutanan
Instansi : Perum Perhutani
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon
Wisuda : Mei 1998

INTISARI

Selama ini kasus pencurian kayu jati, khususnya di wilayah kerja Perum Perhutani yang meliputi areal hutan di Jawa seluas 3.025.935 ha, lebih sering ditengarai akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat desa disekitar hutan yang pada umumnya hidup dalam kondisi miskin. Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani adalah Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) atau Rural Forest Community Development. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar nantinya dapat mengurangi kerusakan hutan akibat pencurian kayu, penggembalaan, dan pengambilan kayu bakar secara liar.

Di sisi lain, khususnya di kawasan hutan jati, kebutuhan kayu pertukangan masyarakat desa di sekitar hutan belum dilihat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan. Kebutuhan kayu pertukangan yang tidak disuplai oleh sistem pasar tersebut, diduga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian kayu jati yang berlangsung terus-menerus sepanjang tahun. Hal ini sudah barang tentu mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi Perum Perhutani, bahkan mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.

Pemasaran kayu jati selama ini hanya menjangkau atau mensuplai masyarakat kota saja. Sementara itu, bagi masyarakat desa di sekitar hutan kayu jati merupakan komponen utama dalam pembuatan rumah, alat-alat rumah tangga, dan alat-alat pertanian. Namun demikian, kebutuhan kayu jati tersebut justru tidak disuplai oleh sistem pasar meskipun tidak ada barang substitusi atau kayu jenis lain yang dapat diterima masyarakat. Kondisi ini justru mendorong terciptanya jaringan pasar gelap kayu jati dan meningkatnya pencurian kayu yang mengancam kelestarian hutan jati di Jawa.

Gambaran tersebut terungkap dari penelitian yang dilakukan di Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Desa Bedingin yang luasnya 743.5 ha dihuni oleh 913 Kepala Keluarga yang terdiri atas 4.153 penduduk. Penelitian dilakukan terhadap kawasan hutan seluas 941,9 ha dan 91 responden atau 10 % dari jumlah Kepala Keluarga.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa pencurian kayu jati bukan hanya karena faktor kondisi sosial ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kebutuhan kayu pertukangan yang tidak disuplai oleh sistem pasar. Rata-rata luas rumah di Desa Bedingin adalah 155,368 m³ yang membutuhkan kayu pertukangan sebanyak

1-4.8132 m³ untuk setiap rumah. Dari perhitungan lebih lanjut diperoleh angka konsumsi kayu pertukangan sebesar 0.4938 m³/KK/tahun, atau 0.10855 m³/kapita/tahun, atau 0,0953 m³ untuk setiap meter persegi luas lantai rumah.

Dari responden juga diperoleh informasi tambahan bahwa masyarakat lebih memilih kayu jati resmi Perum Perhutani andaikata dijual secara langsung di dekat hutan dan dapat dibeli secara eceran sesuai dengan kondisi keuangan masyarakat. Dari hasil perhitungan berikutnya, harga kayu jati curian ternyata lebih mahal dibanding Harga Jual Dasar Perum Perhutani untuk sortimen dan kualita kayu tertentu khususnya tiga jenis kualita paling bawah. Hal ini memungkinkan Perum Perhutani membuat kebijakan untuk mensuplai kebutuhan kayu pertukangan jati bagi masyarakat desa di sekitar hutan.

THE ANALYSIS OF WOODWORKING NEEDS AND THE BLACK MARKET POTENCY OF TEAKWOOD THEFT

Oleh : Sugeng Djarot Sulasmanto
Program Studi : Ilmu Kehutanan
Instansi : Perum Perhutani
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Hasan Simon
Wisuda : Mei 1998

ABSTRACT

The problem of teakwood robbing especially in Java forest region as the working area of Perum Perhutani is often issued because of social economic condition of rural forest community who generally lived in the poor conditions. The one of government program which have implemented by Perum Perhutani is Rural Forest Community Development (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan). These programs have been done to increase the standard of society living, and at last the problem of forest destruction which was caused by wood robbing, herding, and firewood robbing will be decreased.

In the other hand, especially in region of teakwood forest, the need of woodworking of rural communities did not observed as one of the factors that caused forest destruction. The woodworking needs that have not supplied by these market system became one factor which caused the teakwood robbing continuously in a year. These problems caused much financial loose for Perum Perhutani, in fact it was reached a hundred million rupiah a year.

The teakwood marketing as long as the time have been reached just only in the city communities. At the same time, by community who lived around the forest region, the teakwood became a basic housing components, households, and farming tools. Therefore, the need of teakwood for the community have not supplied by these market system, even though nothing substitution goods or other kinds of wood that accepted by the communities. This conditions supports to create the black market network of teakwood theft and to increase wood robbing case that threaten of teakwood forest preservation in Java.

The description expressed from the research in the Bedingin village, Todanan Subdistrict, Blora Regency, and the Propincy of Central Java. Bedingin have large 734,5 hectare occupied by 913 head family, and consist of 4.153 peoples. The research have done to the forest area on 941,9 hectares and 91 respondents or 10% of total head of household (KK) .

The result of the research recorded that teakwood robbing did not only caused by the social economic condition, but also influenced by the woodworking needs which have not been supplied by these market system. Average of housing in the Bedingin village are 14,8132 m² each. The next calculation obtained the number of woddworking consumption average are 0,4938 m³/head of household a year, or 0,10855 m³/capita a year, or 0,0955 m³ / m² of the housing floor.



Other information obtained from the respondents that community more likes to choose Perum Perhutani legal teakwood if the teakwood directly sold in the near of the forest and could be bought for retailed according to their financial condition. Further more calculation, in fact the price of the teakwood theft are cheaper than the Basic Sale Price (Harga Jual Dasar) of Perum Perhutani for sorting and certain wood quality, especially for three kinds of teakwood lower most quality class. These matter makes possible that Perum Perhutani created some marketing policy to supply the need of teak woodworking for the rural forest communities.